

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)**



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dapat melakukan Penyusunan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim merupakan suatu bentuk Laporan dan Evaluasi atas Kegiatan dan Program yang dijalankan yang disajikan dalam Pencapaian Target Kinerja yang diukur dari Realisasi Pencapaian yang diperoleh selama Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara penyusunan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim disusun dengan berpedoman pada Penetapan Kinerja (TAPKIN), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim ini dapat dijadikan acuan untuk Pelaksanaan dan Perencanaan Kegiatan dan Perencanaan Anggaran Keuangan agar tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang dapat diwujudkan.

Muara Enim, Januari 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARA ENIM



H. JUNAIDI, S.H., M., Hum., M.Si
PEMBINA
NIP 19710613 199403 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Data Umum Organisasi.....	1
Struktur Organisasi.....	3
1.2 Visi dan Misi.....	5
1.3 Aspek Strategis dan permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.....	13
3.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.....	14
3.3 Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022,2021,2020.....	15
Perbandingan realisasi kinerja s.d. tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.....	17
3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	18
3.5 Aspek Pendukung Kinerja.....	42
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
3.7 Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja.....	44
3.8 Realisasi anggaran per 31 Desember 2023.....	45
BAB VI PENUTUP	
4.1. Pengukuran Kinerja	51
4.2. Akuntabilitas Keuangan.....	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim..... 4
Tabel 2	Distribusi Aparat Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim..... 4
Tabel 3	Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023..... 12
Tabel 4	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023..... 14
Tabel 5	Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022,2021,2020..... 16
Tabel 6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah renstra s.d. tahun 2024..... 17
Tabel 7	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Persentase Pelanggaran Lalu Lintas..... 18
Tabel 8	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Kendaraan Wajib Uji..... 20
Tabel 9	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum..... 21
Tabel 10	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum..... 22
Tabel 11	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Lokasi ruas jalan yang terlayani prasarana lalu lintas..... 23
Tabel 12	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Persentase Turunnya Pelanggaran Lalu Lintas..... 24
Tabel 13	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Rasio Izin Trayek 25
Tabel 14	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Uji PKB Angkutan Umum..... 30
Tabel 15	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Terminal Angkutan Umum..... 32
Tabel 16	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Angkutan Darat (Umum)..... 33
Tabel 17	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Persentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum..... 34
Tabel 18	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum..... 36
Tabel 19	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Rasio Panjang Jalan Per - Jumlah Kendaraan..... 38
Tabel 20	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun..... 39
Tabel 21	Realisasi dan Pencapaian tahun dari 2020 s.d. 2023 Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun..... 41
Tabel 22	SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 42
Tabel 23	SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan pangkat/golongan..... 42
Tabel 24	Rekapitulasi Mutasi Barang..... 43
Tabel 25	Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023 45

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Persentase Turunnya	
Grafik 2	Pelanggaran Lalu Lintas di Bidang Perhubungan	18
Grafik 3	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji.....	20
Grafik 4	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Persentase Angkutan Laik Jalan. Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Orang yang Terangkut	21
Grafik 5	Angkutan Umum.....	22
Grafik 6	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum.....	24
Grafik 7	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan.....	25
Grafik 8	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Rasio Izin Trayek	27
Grafik 9	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor.....	30
Grafik 10	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Terminal Angkutan Umum.....	32
Grafik 11	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Angkutan Darat (Umum).....	34
Grafik 12	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU.....	35
Grafik 13	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	37
Grafik 14	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan.....	38
Grafik 15	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun.....	40
	Tingkat Capaian dari Tahun 2020 s.d. 2023 : Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun.....	41



BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Penyusunan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan pelaporan kinerja dimaksudkan adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai pelaksana peraturan pemerintah Nomor: 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang menyatakan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perhubungan di Kabupaten Muara Enim sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas yang dimaksud. Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- 5) Pengelolaan di bidang kesekretariatan meliputi : umum, perencanaan dan keuangan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perhubungan;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;



STRUKTUR ORGANISASI

Untuk menunjang kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dalam kegiatan pembangunan bidang perhubungan, maka penataan susunan struktur organisasi dengan berdasarkan peraturan daerah nomor 02 tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (eselon II/a)
- b. Sekretaris (eselon III/a)
- c. Bagian Sekretariat (eselon IV/a)
 - 1) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan (eselon IV/a)
 - 2) Sub bagian Umum (eselon IV/a)
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (eselon III/b)
 - 1) Analis Kebijakan Publik Sub Koordinator Angkutan (eselon IV/a)
 - 2) Seksi Lalu Lintas (eselon IV/a)
 - 3) Seksi Pengendalian Parkir (eselon IV/a)
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan (eselon III/b)
 - 1) Analis Kebijakan Publik Sub Koordinator Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan (eselon IV/a)
 - 2) Seksi Keselamatan (eselon IV/a)
 - 3) Seksi Lingkungan Perhubungan (eselon IV/a)
- f. Bidang Prasarana (eselon III/b)
 - 1) Analis Kebijakan Publik Sub Koordinator Pengguna Prasarana (eselon IV/a)
 - 2) Seksi Pengoperasian Prasarana (eselon IV/a)
 - 3) Seksi Pemeliharaan Prasarana (eselon IV/a)

Penataan Susunan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, yaitu sebagai berikut :

- g. UPTD operasional dan penunjang
 - 1. UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim (eselon IV/a)
 - 2. UPTD Pengelolaan Terminal Tanjung Enim (eselon IV/a)
 - 3. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) (eselon IV/a)
 - 4. UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang (eselon IV/a)
- h. Kelompok jabatan fungsional

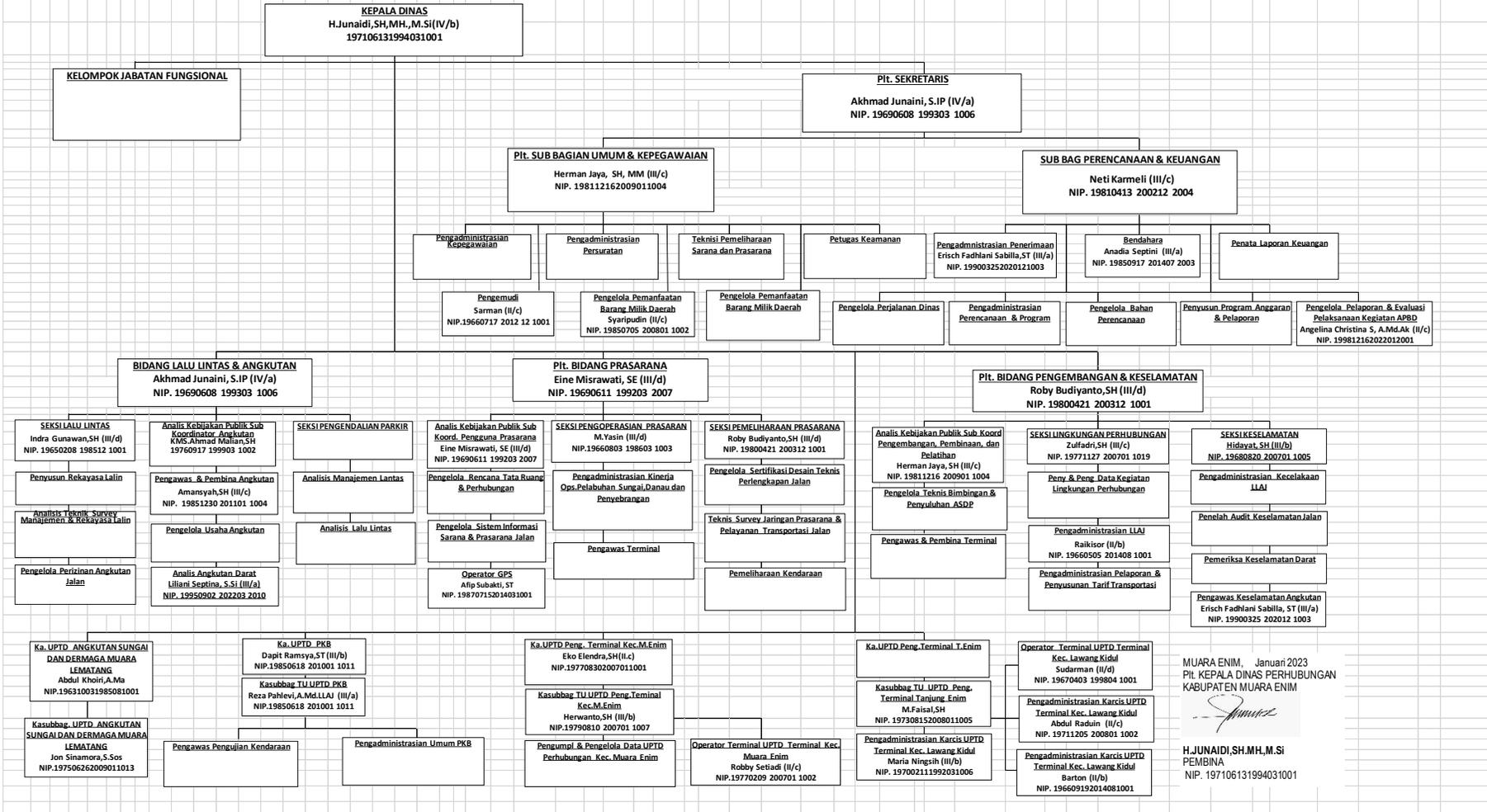
Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar Struktur Organisasi

PERATURAN DAERAH KAB. MUARA ENIM
NOMOR 31 TAHUN 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023





Susunan kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 disusun berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Susunan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	IV d	IV c	Iv b	Iv a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	I c	TKWT	JML
S3															0
S2			2	2		1		2							7
S1				1	2	7	4	4						54	72
D3										1				6	7
SLTA					1		1	2	2	3	1			128	138
SLTP														1	1
SD														1	1
Jumlah			2	3	3	8	5	8	2	4	1			190	226

Tabel 2
Distribusi Aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023

No	Penempatan Aparatur	ASN (orang)	TKWT (orang)
1	Kantor Dinas Perhubungan	22	128
2	UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim	5	38
3	UPTD Pengelolaan Terminal Tanjung Enim	3	12
4	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	4	11
5	UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang	2	1
Jumlah		36	190



1.2 VISI DAN MISI

a. VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Muara Enim serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana arah pembangunan Kabupaten Muara Enim dalam lima tahun mendatang, Baperlitbang Kabupaten Muara Enim telah berupaya untuk memberikan dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim 2020-2023 yang berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah Dalam menyusun Renstra OPD .

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Muara Enim pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Muara Enim menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Muara Enim baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Muara Enim untuk periode 2020-2023 sebagai berikut:

“MUARA ENIM UNTUK RAKYAT YANG AGAMIS, BERDAYA SAING, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”

Berdasarkan visi misi di atas, maka ditetapkan visi misi pembangunan daerah jangka menengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Bertakwa, Cerdas dan Mandiri.
2. Mewujudkan Pembinaan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Duafah dan Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin hingga Mandiri.
3. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komuditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan.
4. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan yang Mudah dijangkau dan bebas Biaya.



5. Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur dasar yang Berkualitas secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.
6. Memanfaatkan Potensi SDA untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan telaah Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Maka Dinas Perhubungan mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati secara langsung terutama di Misi ke Lima yaitu:

Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur dasar yang Berkualitas secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan TOL Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Tujuan dari Misi Kelima yang mendukung Dinas Perhubungan adalah :

Transportasi lancar dan terbuka jalan baru serta mendukung terwujudnya Jalan TOL Muara Enim – Indralaya – Palembang.

Pembangunan insprastruktur sangat penting untuk mendukung kelancaran transportasi, pembangunan Insfratruktur Dan Sufrastruktur di sektor Perhubungan merupakan proses untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat transportasi lancar dan arus akan mendukung terwujudnya peningkatan ekonomi bagi masyarakat, Transportasi yang lancar harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Sarana transpotasi berupa kendaraan angkutan barang dan orang yang memadai. Pelayanan angkutan orang terselenggara jika adanya angkutan umum yang mengangkut orang dengan kendaraan khusus mobil penumpang umum (MPU).

Ketersedian prasarana transportasi juga mendukung kelancaran dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Sebagai suatu daerah agraris artinya Kabupaten Muara Enim adalah sebagian wilayahnya bergerak di bidang pertanian dan perkebunan serta kawasan industri, Mobilisasi masyarakat cukup tinggi dari satu daerah menuju pusat perekonomian, perindustrian maupun pemerintahan tentunya membutuhkan sarana dan prasarana transportasi, guna untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan maupun mengangkut orang atau barang, serta mendukung pengembangan kawasan industri, angropolitan wisata dan lainnya.

Sistem transportasi yang terintegrasi memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Muara Enim transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus orang dan barang sehingga dengan



adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Memantapkan stabilitas daerah, meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan antar moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian maupun transportasi di perairan. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan yang digerakan oleh manusia dan mesin.

Transportasi digunakan untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas sehari-hari lebih lanjut, Guna mewujudkan transportasi yang lancar maka disini peranan Dinas Perhubungan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan transportasi tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah meningkatkan transportasi yang mudah, cepat, aman dan nyaman.

1.3 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang perhubungan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi umum perencanaan dan keuangan
- f. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perhubungan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, teridentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu:

a. Faktor internal

1) Sumber Daya Manusia

Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi aktual dimana Di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tenaga teknis yang ahli dibidang perhubungan persentasenya masih sangat rendah, SDM di bidang perhubungan masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi guna menunjang kinerja



aparatur, penempatan pegawai masih belum sesuai dengan pendidikan maupun keahlian (berdasarkan sertifikat keahlian).

2) Kebijakan di Bidang Perhubungan

Hal tersebut dapat diketahui dari Terbatasnya kewenangan PPNS Dishub Muara Enim dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik Jalan di luar terminal dan timbangan. Belum optimalnya pengawasan terhadap Angkutan Hal tersebut dapat diketahui dari masih Rendahnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak Dishub Muara Enim, Masih kurangnya sosialisasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terkait syarat dan kelengkapan surat menyurat kendaraan oleh petugas PPNS Dishub Muara Enim pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik jalan.

3) Sarana dan Prasarana Perhubungan

Hal Ini dilihat dari Kondisi Kendaraan Dinas Aparatur yang Minim. Kendaraan dinas Kepala Dinas dan kendaraan operasional dengan kondisi sudah kurang laik, tahun pengadaan sudah lama, dan Kurangnya lahan parkir khusus di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.

b. Faktor External

1) Kesadaran Masyarakat

Hal tersebut dapat diketahui dari Tingkat kesadaran pemilik kendaraan yang masih rendah, Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum, Kurangnya kesadaran dan kemauan orang untuk melalui terminal, Kendaraan penumpang tidak masuk/melewati terminal dalam hal yang disebabkan rendahnya kesadaran pemilik kendaraan penumpang untuk masuk terminal.

2) Peran Serta Masyarakat

Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi aktual dimana Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi atau ojek daripada angkutan umum, hal tersebut karena Tingginya biaya angkutan umum, Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan pribadi roda dua dan roda empat.

3) Tingginya pertumbuhan kuantitas angkutan umum plat hitam

Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi dimana Banyaknya kendaraan plat hitam menjadi kendaraan penumpang Umum.

4) Tingginya pertumbuhan kuantitas kendaraan pribadi (roda 4 dan roda 2)

Kendaraan ojek ini menyebabkan pendapatan pemilik kendaraan yang wajib izin trayek menurun, sehingga izin trayek tidak dipenuhi, disamping itu juga adanya Permendagri No :101 Tahun 2014 bahwa setiap angkutan umum harus berbadan hukum, untuk mendirikan badan hukum minimal 5 unit kendaraan.



Dari beberapa isu tersebut, dapat ditarik isu strategis dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan kabupaten Muara Enim, sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peningkatan kompetensi aparatur Dinas Perhubungan dengan merekrut aparatur yang sesuai pendidikan/keahlian yang dibutuhkan atau dengan mengadakan diklat terhadap aparatur baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri.
- b. Peningkatan kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pelayanan perhubungan, tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), tentang angkutan penumpang dan barang, tentang kebijakan di bidang perhubungan, tentang fungsi terminal dan kelengkapan jalan.
- c. Penyediaan anggaran untuk Sarana Kelancaran Aparatur Dinas Perhubungan dan Kelancaran Melaksanakan Tugas dan Fungsi.
- d. Banyak Truk Melakukan Bongkar/Muat Barang dan Parkir di Badan Jalan dalam Kecamatan Muara Enim.
- e. Tingginya Angka Kecelakaan dan Korban Kecelakaan di Perlintasan Sebidang Kereta Api. Akibat banyak Perlintasan Sebidang Belum dilengkapi Pintu Perlintasan.
- f. Kurangnya Sarana Dermaga di Daerah yang ada Aktifitas Angkutan Sungai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mempedomani ketentuan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil



pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2023;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja.
- 3.2. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun masih berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan harapan perjanjian kinerja/kesepakatan kinerja antara kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan atasan Bupati dapat diwujudkan pada akhir tahun anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis tahun 2022-2023, disusun suatu rencana kerja (*performan plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dalam perencanaan kinerja (RENJA)/Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diuraikan sasaran-sasaran yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3
Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN		
Indikator Utama						
1	Meningkatnya Ketertiban Berjalan Lintas di Jalan	1	Persentase turunnya pelanggaran lalu lintas di Bidang Perhubungan	98	%	
		2	Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji	98	%	
2	Meningkatnya Kuantitas, kualitas sarana dan prasarana transportasi	3	Persentase Angkutan Laik Jalan	98	%	
		4	Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum	1.043.000	orang	
		5	Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum	11.711.203	Ton	
		6	Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	45,62	%	
		Indikator Pendukung				
		7	Rasio izin trayek	0,03	Rasio	
		8	Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor	8.130	Unit	
		9	Jumlah Terminal Angkutan Umum	3	Unit	
		10	Jumlah Angkutan Darat (Umum)	4.120	Unit	
		11	Persentase kepemilikan Kartu Uji KBWU	90	%	
		12	Lama pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	10	Menit	
		13	Rasio Panjang Jalan Per-Jumlah Kendaraan	0,00592	Rasio	
		14	Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun	217.200	Orang	
		15	Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun	2.171	Ton	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi atas anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

Metode Pengukuran Kinerja

a. Uraian Singkat

Pengukuran capaian kinerja diajukan dengan menggunakan metode perbandingan antara kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance Result*) yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana melaksanakan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang.

b. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari pemikiran yang sistematis dan berkesinambungan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan *formula* (rumus) dengan tinjauan apabila semakin tinggi realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi, rumusan perhitungan sebagai berikut :

- 1) Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja kinerja yang semakin tinggi :

$$\frac{\text{Prosentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian

$$\frac{\text{Prosentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$



- 3) Rumusan yang digunakan, apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya pencapaian

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi}) \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

3.2 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim telah menetapkan 1 (Satu) sasaran Strategis. Sasaran strategis tersebut terdiri atas 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas di Jalan	1. Persentase Turunnya Pelanggaran Lalu Lintas di Bidang Perhubungan	%	98	88	89,8
	2. Persentase turunnya angka kecelakaan Lalu Lintas kendaraan wajib uji	%	98	90	91,8
Meningkatnya Kuantitas, kualitas sarana dan prasarana transportasi	3. Persentase Angkutan Laik Jalan	%	98	87	88,7
	4. Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum	Orang	1.043.000	998.700	95,75
	5. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum	Ton	11.711.203	10.087.500	86,14
	6. Rasio Izin Trayek	%	0,03	0,01	33,34



	7. Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor	Unit	8.130	2.453	30,17
	8. Jumlah Angkutan Darat (Umum)	Unit	4.120	3.975	96,48
	9. Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU	%	90	81	90,00
	10. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	10	10	100,00
	11. Rasio panjang jalan per- jumlah kendaraan	Rasio	0,00592	0,006	101,35
	12. Jumlah orang melalui terminal per-tahun	Orang	217.200	205.410	94,57
	13. Jumlah barang melalui terminal per-tahun	Ton	2.171	2.054	94,61
	14. Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	%	45,62	44,99	98,63
	15. Jumlah Terminal Angkuan Umum	Unit	3	2	66,67

3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN 2022, 2021, 2020

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini disajikan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian capaian kinerja 3 (tiga) tahun sebelumnya yaitu tahun, 2022, 2021 dan 2020. Berikut perbandingan antara capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2022, 2021 dan 2020:



Tabel 5
Perbandingan Antara Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2023 dengan Tahun 2022, 2021, 2020.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		2021		2022		2023	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capain (%)	Realisasi	Capain (%)	Realisasi	Capain (%)
1	Persentase turunnya pelanggaran lalu lintas di Bidang Perhubungan	%	91	94,79	92	95	94	95,9	88	89,79
2	Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji	%	93	96,87	84	87	88,2	90	90	91,83
3	Persentase Angkutan Laik Jalan	%	87,86	91,52	87	90	95	97,93	87	88,77
4	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	849.994	81,23	889.398	85	1.041.858	99,56	998.700	95,75
5	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	11.122.000	95	10.538.550	90	10.890.486	93	10.087.500	86,14
6	Rasio Izin Trayek	%	0,01	100	0,01	50	0,01	50	0,01	33,34
7	Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor	Unit	6.969	93,54	2.723	35,59	2.616	33,24	2.453	30,17
8	Jumlah Terminal Angkutan Umum	Unit	2	100	2	100	2	66,67	2	66,67
9	Jumlah Angkutan Darat (umum)	Unit	3.149	80	3.995	99,89	3.644	89,78	3.975	96,48
10	Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU	%	81,93	99,91	100	118	90	103,4	81	90,00
11	Lama pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Menit	20	100	20	100	20	100	10	100,00
12	Rasio panjang jalan per- jumlah kendaraan	Km	0.00617	104	0.00592	100	0.00672	113,5	0,0060	101,35
13	Jumlah orang melalui terminal per-tahun	orang	130.715	60,76	144.251	67	185.239	85,28	205.410	94,57
14	Jumlah barang melalui terminal per - tahun	ton	1.745.42	61,93	1.356	63	1.751,2	80,63	2.054	94,61
15	Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	%	10	26,23	44	107	36	83,48	44,99	98,63



3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini disajikan perbandingan capaian sasaran strategis tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun. Berikut perbandingan antara capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 dengan target kinerja tahun 2023 dan 2024 :

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah Perencanaan Strategis s.d. Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN KE-	
			2023	2024
1	Persentase turunnya Pelanggaran Lalu Lintas di Bidang Perhubungan	88	98	-
2	Persentase turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji	90	98	-
3	Persentase Angkutan Laik Jalan	87	98	95
4	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum	998.700	1.043.000	474.000
5	Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum	10.087.500	11.711.203	-
6	Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	44,99	45,62	50
7	Rasio Izin Trayek	0,01	0,03	0,02
8	Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor	2.453	8.150	2.923
9	Jumlah Terminal Angkutan Umum	2	3	2
10	Jumlah Angkutan Darat (umum)	3.975	4.120	11
11	Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU	81	90	-
12	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	10	10	20
13	Rasio Panjang Jalan Per- Jumlah Kendaraan	0,0060	0.00592	0,00672
14	Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun	205.410	217.200	215.100
15	Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun	2.054	2.172	-



3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan Terwujudnya Transportasi yang Mudah, Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Selamat.

Pada sasaran ini ada 15 (Lima Belas) indikator kinerja yang diklasifikasikan 5 (Lima) indikator kinerja Utama (IKU) dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Pendukung (IKP) sebagai penentu keberhasilan organisasi sedangkan tingkat keberhasilan masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama : Persentase Turunnya Pelanggaran Lalu Lintas di Bidang Perhubungan

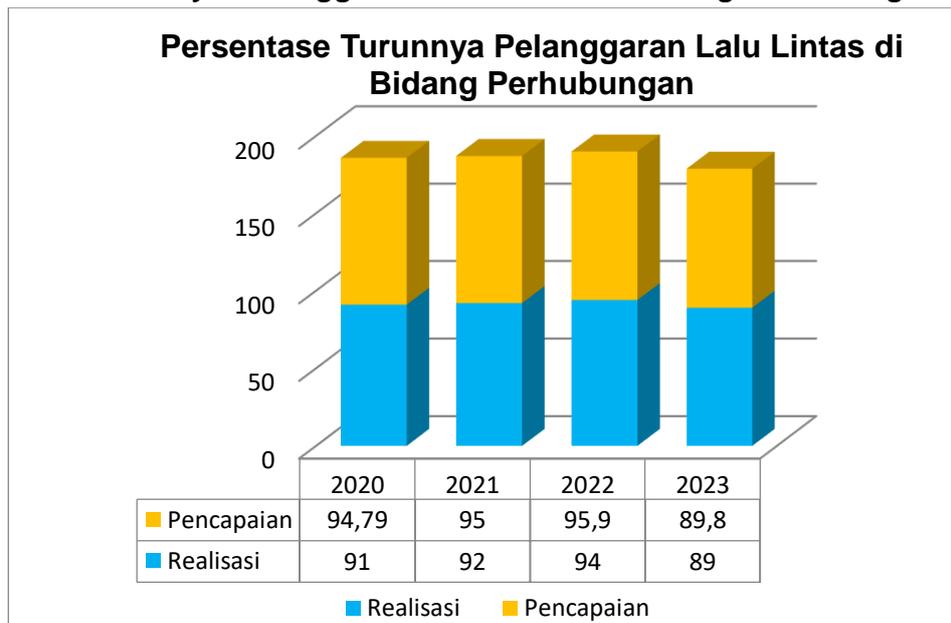
Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Persentase Turunnya Pelanggaran Lalu Lintas

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	91	92	94	88
Pencapaian	94,79	95	95,9	89,8

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 1 berikut ini :

Grafik 1
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Persentase Turunnya Pelanggaran Lalu Lintas di Bidang Perhubungan





Ketertiban berlalu lintas adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Sedangkan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu problema yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, bentuknya beraneka ragam mulai dari menerobos lampu merah, tidak membawa surat-surat kendaraan, berkendara dijalur yang tidak semestinya. Pelanggaran lalu lintas menyebabkan berbagai dampak negative, yang salah satu yang paling sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas salah satu diantaranya adalah sedikitnya tingkat pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan.

Adapun beberapa permasalahan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Muara Enim antara lain :

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor wajib uji yang tidak laik jalan atau tidak dilengkapi dengan tanda bukti kelaikan jalan (Tanda bukti lulus uji)
- b. Parkir kendaraan tidak pada tempat parkir yang disediakan yang dilengkapi dengan rambu dan marka parkir.
- c. Angkutan umum tidak dilengkapi dengan perizinan angkutan angkutan umum (izin trayek) atau izin operasional untuk angkutan umum tidak dalam trayek
- d. Melanggar tata cara pemuatan melebihi daya angkut yang diizinkan.

Solusi dan saran untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum dan pemilihan Abdiyasa Teladan Tingkat Kabupaten
- b. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan kepada para pelajar tingkat SLTA/SMK dan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan tingkat Kabupaten
- c. Melaksanakan kegiatan uji petik terhadap kelaikan jalan kendaraan angkutan umum dan barang yang melintas di wilayah kabupaten
- d. Melaksanakan penertiban parkir. Di kawasan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan dalam kota Muara Enim dan Tanjung Enim
- e. Memaksimalkan pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor di Balai Uji kendaraan bermotor.



2. Indikator Kinerja Utama : Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji

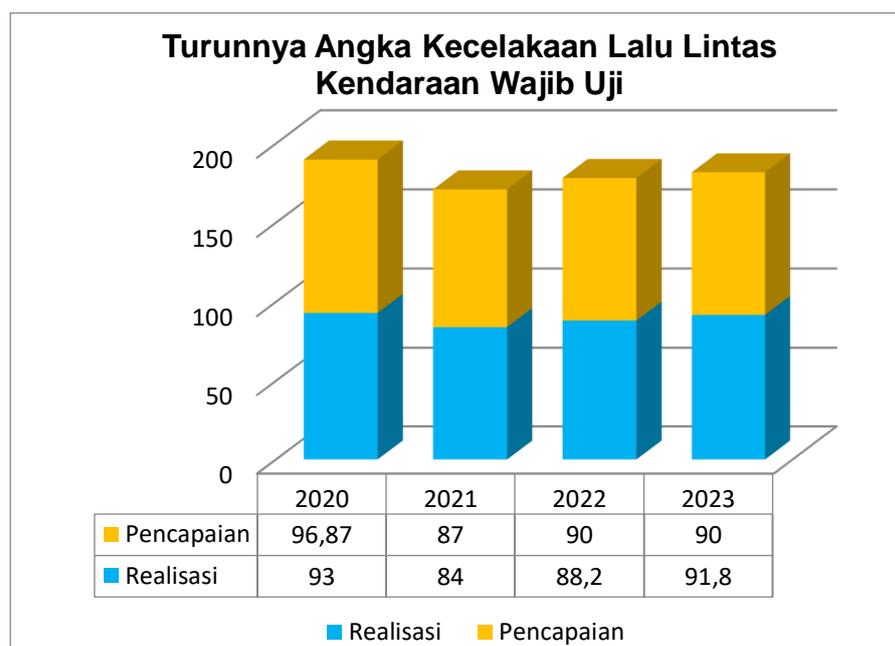
Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	93	84	88,2	90
Pencapaian	96,87	87	90	91,8

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 2 berikut ini :

Grafik 2
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi Persentase Turunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Wajib Uji selama 3 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pencapaian ini terus dilakukan dengan :

- Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM.



3. Indikator Kinerja Utama : Persentase Angkutan Laik Jalan

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan Fluktuatif (naik/turun), seperti yang terlihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Persentase Angkutan yang laik jalan

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	87,86	87	95	87
Pencapaian	91,52	90	97,93	88,7

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 3 berikut ini :

Grafik 3
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2019 s.d. 2022
Persentase Angkutan laik jalan



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Persentase Angkutan yang laik jalan selama tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan fluktuatif. Tahun 2022 mengalami puncak peningkatan dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis. Untuk meningkatkan pencapaian ini dilakukan dengan:

- Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi kegiatan antar instansi terkait yang berwenang.
- Memperbanyak sosialisasi baik lewat media atau spanduk.
- Mewujudkan kerjasama maupun Mou dengan dealer pemegang merk kendaraan maupun pihak swasta yang ada di Kabupaten Muara Enim.



- e. Komunikasi dengan pemilik kendaraan yang tidak melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor berkala melalui surat.

4. Indikator Kinerja Utama : Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum yaitu orang yang menggunakan angkutan dengan cara menaiki kendaraan angkutan umum dari tempat asal (tempat tinggal) atau dari terminal angkutan umum ke tempat tujuan.

maksud dan tujuan peningkatan orang yang terangkut angkutan umum adalah agar masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan angkutan umum. Yang termasuk kendaraan yang diklasifikasikan dalam angkutan orang yaitu semua kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang. Kondisi kendaraan angkutan orang di Kabupaten Muara Enim sudah baik dan laik jalan.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 mengalami fluktuatif (naik dan turun) seperti yang terlihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	849.994	889.398	1.041.858	998.700
Pencapaian	81,23	85	99,56	95,75

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 4 berikut ini :

Grafik 4
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum





Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum selama 4 tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pencapaian ini terus dilakukan dengan:

- a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
- b. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan terhadap penumpang angkutan umum dengan biaya yang murah misalnya dengan pengadaan angkutan oleh pemerintah seperti Transmudi Palembang untuk Kota Muara Enim direncanakan seperti Trans Enim yang melayani jurusan dalam kota.

5. Indikator Kinerja Utama : Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Barang yang terangkut angkutan umum (angkutan barang) adalah barang yang menggunakan angkutan umum untuk diangkut dari tempat asal ke tempat tujuan. Adapun kendaraan yang diklasifikasikan dalam angkutan barang adalah kendaraan yang hanya mengangkut barang (bukan orang). Kondisi kendaraan angkutan barang di Kabupaten Muara Enim rata-rata masih laik jalan. Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum adalah total keseluruhan (tonase) barang yang terangkut angkutan umum di wilayah Kabupaten Muara Enim baik yang diangkut menggunakan truck maupun dengan menggunakan truck berat.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan Penurunan, seperti yang terlihat pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	11.702.000	10.538.550	10.890.486	10.087.500
Pencapaian	95	90	93	86,14

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 5 berikut ini :



Grafik 5
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa kondisi Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum selama 4 tahun terakhir menunjukkan Fluktuatif. Tahun 2023 mengalami Penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan pencapaian ini terus dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi terhadap peraturan Angkutan Barang dan Penumpang.

6. Indikator Kinerja Utama : Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan penurunan, seperti yang terlihat pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	10,00	44,00	36,00	44,99
Pencapaian	26,23	107	83,48	98,6

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 6 berikut ini :



Grafik 6
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Persentase Ruas Jalan Yang dilengkapi Kelengkapan Jalan



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Persentase Lokasi Ruas Jalan Yang Terlayani Prasarana Lalu Lintas selama 4 tahun terakhir mengalami Fluktuatif. Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk terus meningkatkan pencapaian ini dilakukan dengan :

- Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
- Meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas
- Meningkatkan dana penganggaran.

7. Indikator Kinerja Pendukung : Rasio Izin Trayek

Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2023, tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan menurun seperti yang terlihat pada tabel 13 berikut ini :

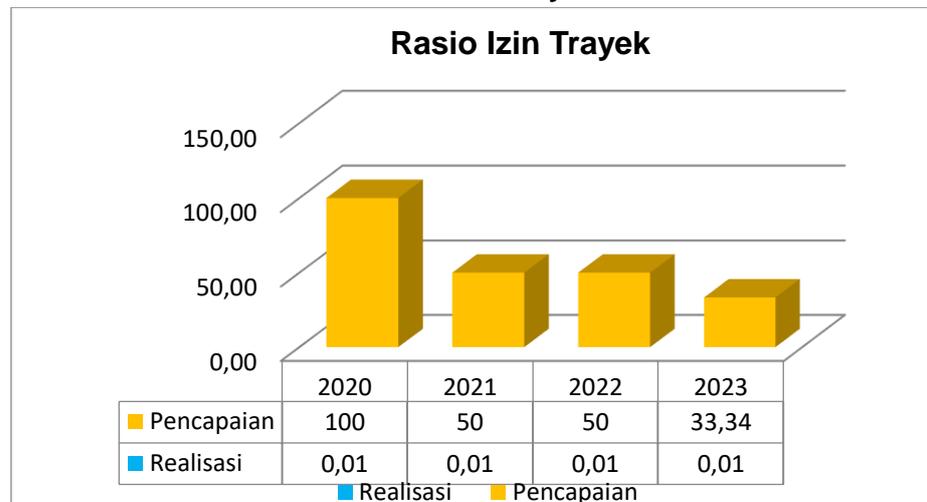
Tabel 13
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Rasio Izin Trayek

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	0,01	0,01	0,01	0,01
Pencapaian	100	50	50	33,34

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 7 berikut ini :



Grafik 7
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Rasio Izin Trayek



Izin Trayek adalah izin yang diberikan terhadap kendaraan dengan lintasan/rute kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

a. Maksud dan tujuan izin trayek

Yang menjadi maksud dan tujuan izin trayek adalah sebagai sarana pengawasan dan pengendalian pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum pada rute/trayek yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan jasa angkutan.

b. Kendaraan yang wajib memiliki izin trayek

Adapun kendaraan yang wajib memiliki izin trayek adalah setiap kendaraan umum/kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum yang dipungut bayaran. Contoh mobil bus.

c. Kendaraan yang telah memiliki izin trayek

Yang diklasifikasikan kendaraan telah memiliki izin trayek adalah mobil penumpang umum yang telah memegang surat izin trayek

Berikut permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan rasio izin trayek di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, yaitu :

1. Untuk Angkutan Perkotaan:

- Kurangnya pengawasan terhadap kendaraan wajib izin trayek di Kabupaten Muara Enim
- Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib izin trayek untuk mentaati aturan dan memahami pentingnya kelengkapan surat izin trayek.

2. Untuk Angkutan Perdesaan

Berdasarkan hasil survey, banyaknya kendaraan penumpang yang tidak memiliki izin trayek dikarenakan kendaraan tersebut beralih fungsi pada



- saat musim buah menjadi kendaraan angkutan barang sehingga para pemilik kendaraan tidak melengkapi surat-surat izin, diantaranya izin trayek.
3. Adapun penyebab timbulnya permasalahan dalam peningkatan rasio izin trayek, yaitu : Tingkat kesadaran pemilik kendaraan untuk mentaati aturan rendah, pengawasan terhadap kendaraan wajib izin trayek masih rendah.
 4. Solusi dan saran guna peningkatan rasio izin trayek
Yang dapat dijadikan solusi dan saran guna peningkatan rasio izin trayek yaitu dengan sosialisasi kepada pemilik/pemegang kendaraan, pengawasan terhadap kendaraan wajib izin trayek.

Pada Tahun 2023 target realisasi izin trayek tercapai tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa *trend* perkembangan Rasio Izin Trayek selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut dikarenakan :

- a. Banyaknya kendaraan plat hitam menjadi kendaraan penumpang
Dengan adanya Aplikasi Grab yang praktis dan terjangkau banyak masyarakat menggunakannya hal ini menyebabkan pendapatan kendaraan yang wajib izin trayek menurun. Banyaknya ojek dalam Kabupaten Kondisi ojek ini menyebabkan pendapatan pemilik kendaraan yang wajib izin trayek menurun, sehingga izin trayek tidak dipenuhi.
- b. Dampak dari terbitnya Permendagri Nomor 101 Tahun 2014 tersebut, Maka para Pemilik kendaraan angkutan umum masih kurang kesadaran dan pemahaman untuk membuat izin trayek yang baru atau memperpanjang izin berlaku izin trayek, dikarenakan biaya yang tinggi untuk proses penerbitan izin berbadan Hukum. Untuk saat ini belum ada pengusaha angkutan umum yang berbadan Hukum di Kabupaten Muara Enim.

8. Indikator Kinerja Pendukung : Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor

Uji KIR Kendaraan Bermotor atau Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Maksud dan tujuan Uji KIR Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, disebutkan bahwa maksud dan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor wajib uji berkala di jalan.
- b) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor wajib uji berkala di jalan.



- c) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
 - f. Kendaraan yang Wajib Uji KIR Kendaraan Bermotor
Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, Pasal 143 PP 55 tahun 2012 dan Pasal 3 ayat (1) PM 19 Tahun 2021, Jenis kendaraan Wajib Uji :
 - a) Mobil penumpang umum;
 - b) Mobil bus;
 - c) Mobil barang;
 - d) Kereta gandengan; dan
 - e) Kereta tempelan
 - g. Kendaraan yang telah melakukan Uji KIR Kendaraan Bermotor
Adapun kendaraan yang telah melakukan uji KIR di Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :
 - a) Mobil penumpang umum
Adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dengan dipungut bayaran.
 - b) Mobil Bus
Adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 - c) Mobil Barang
Adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
 - d) Kereta Gandengan
Adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
 - e) Kereta Tempelan
Adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk menangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
- Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor
- Berdasarkan hasil analisa ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, antara lain:
- a) Masih adanya kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR.
 - b) Banyak kendaraan angkutan barang jenis truck yang tidak melakukan uji KIR karena Over Dimensi, dan tidak mau melakukan normalisasi/pemotongan dimensi kendaraan sesuai dengan pabrik.
 - c) Kurangnya penindakan dari aparat penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang melaksanakan uji KIR/tidak memiliki Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe).



- d) Wilayah Kabupaten Muara Enim yang cukup luas, sehingga masyarakat yang berada jauh dari UPtD Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mau datang melaksanakan pengujian karena jarak yang sangat jauh. Dan ada juga ketika sudah datang ternyata pelayanan sudah tutup sehingga masyarakat malas untuk datang Kembali.

Penyebab timbulnya permasalahan (internal & external) dalam Peningkatan Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor

Penyebab Internal:

- a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Penguji Kendaraan Bermotor dan SDM yang memahami administrasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- b) Terbatasnya kewenangan PPNS Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik uji di luar terminal dan timbangan;
- c) Masih terbatasnya anggaran untuk mengadakan mobil uji keliling.

Penyebab External:

- a) Kemampuan ekonomi masyarakat, apabila harga produk perkebunan turun maka akan berdampak kepada semua hal termasuk KIR Kendaraan Bermotor;
- b) Letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga memberatkan operasional pemilik kendaraan bermotor;
- c) Kurangnya kesadaran pemilik untuk mengurus KIR Kendaraan Bermotor karena mobilnya di dalam perkebunan atau alasan jarang jalan;
- d) Kurangnya pendindakan di jalan untuk Kendaraan Bermotor wajib uji yang tidak memiliki KIR atau Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor.

Solusi dan saran guna peningkatan Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor

Solusi :

- a) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan – perusahaan akan pentingnya untuk melaksanakan uji KIR Kendaraan Bermotor sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk pengawasan dan penindakan kendaraan bermotor yang tidak memiliki KIR Kendaraan Bermotor.
- c) Mewujudkan kerjasama dengan dealer / agen pemegang merk kendaraan dan bengkel karoseri.

Saran :

Agar aparat penegak hukum menindak tegas untuk kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji KIR Kendaraan Bermotor dan Pemerintah Pusat juga dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindak bengkel



karoseri yang tidak memiliki izin resmi dan memproduksi karoseri yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Kendaraan Over Dimensi)

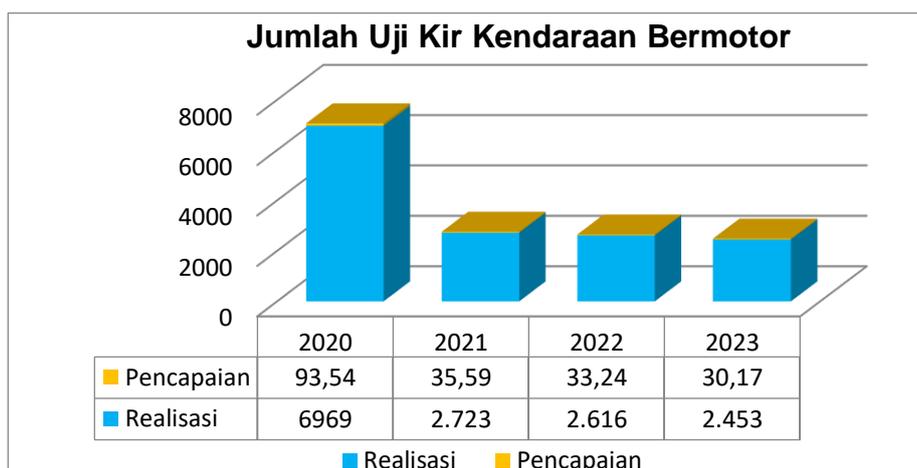
Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan penurunan capaian realisasi seperti yang terlihat pada tabel 14 berikut ini :

Tabel 14
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	6.969	2.723	2.616	2.453
Pencapaian	93,54	35,59	33,24	30,17

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 8 berikut ini :

Grafik 8
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Jumlah Uji Kir Kendaraan Bermotor selama 4 tahun terakhir menunjukkan Penurunan. Tahun 2023 mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh:

- Mulai awal tahun 2021 Pengujian Kendaraan Bermotor telah menerapkan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang telah terintegrasi dengan Kementerian Perhubungan RI.
- Kendaraan yang diuji harus sesuai dengan standar (sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor)
- Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Muara Enim terdapat beberapa yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti melebihi dimensi kendaraan dan adanya modifikasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya



(mobil barang digunakan untuk penumpang), sehingga tidak bisa diberikan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)

- d. Apabila UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tetap mengeluarkan Bukti Lulus Uji untuk kendaraan yang tidak sesuai standar, maka akan mendapat teguran bahkan sampai penutupan pengoperasian dari Kementerian Perhubungan RI.
- e. Beberapa kendaraan yang tidak lulus uji lebih memilih untuk tidak melakukan pengujian daripada harus memperbaiki dan merubah kendaraan sesuai dengan standarnya karena menurutnya mempengaruhi keuntungan yang mereka dapat.
- f. Kurangnya penegakan hukum dari Instansi terkait terhadap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan yang tidak sesuai standard dan tidak dilengkapi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e), karena Dinas Perhubungan sendiri memiliki keterbatasan dalam melakukan penegakan hukum di jalan.

Untuk meningkatkan pencapaian ini terus dilakukan dengan:

- a. Pengoptimalan sosialisasi tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) terkait syarat dan kelengkapan surat menyurat kendaraan oleh petugas PPNS Dinas Perhubungan Muara Enim pada saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik jalan
- b. Memaksimalkan kewenangan PPNS Dinas Perhubungan Muara Enim dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan laik uji di luar terminal dan timbangan
- c. Terus mensosialisasikan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan angkutan umum dalam melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum.

9. Indikator Kinerja Pendukung : Jumlah Terminal Angkutan Umum

Terminal Angkutan Umum merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang serta perpindahan moda angkutan.

- a. Maksud dan tujuan Terminal Angkutan Umum
Adapun maksud dan tujuan terminal angkutan umum yaitu sebagai simpul atau tempat pelayanan terhadap tersedianya angkutan umum bagi penumpang.
- b. Kendaraan yang Wajib masuk terminal Angkutan Umum
Adapun kendaraan yang wajib masuk terminal angkutan umum yaitu semua kendaraan angkutan penumpang umum (perkotaan/perdesaan)
- c. Kondisi Terminal Angkutan Umum di Muara Enim dan peran terminal
Adapun kondisi terminal angkutan umum di Muara Enim dan peran terminal yaitu sangat baik dan sangat memiliki peran penting. Diketahui bahwa



terminal angkutan umum di Kabupaten Muara Enim selama tahun 2013 s.d. 2018 belum terpenuhi sesuai kebutuhan terminal.

- d. Penyebab timbulnya permasalahan dalam Peningkatan Jumlah terminal angkutan umum Penyebab timbulnya permasalahan dalam peningkatan jumlah terminal angkutan umum adalah karena dana/anggaran untuk pembuatan terminal angkutan umum belum tersedia.
- e. Solusi dan saran guna peningkatan Jumlah terminal Angkutan Umum Sebagai solusi dan saran guna peningkatan jumlah terminal angkutan umum adalah agar sesegera mungkin dibangun terminal baru yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum (penumpang).

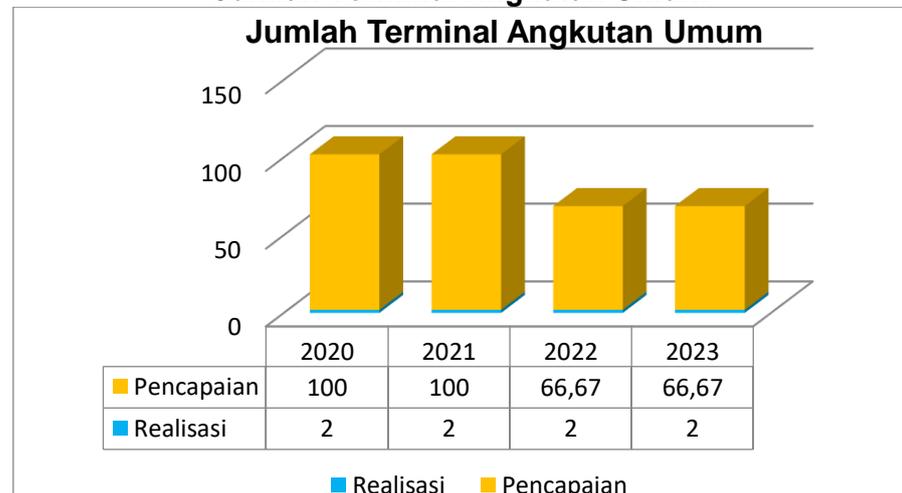
Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan tetap seperti yang terlihat pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Terminal Angkutan Umum

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	2	2	2	2
Pencapaian	100	100	66,67	66,67

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 9 berikut ini :

Grafik 9
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Terminal Angkutan Umum



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Kondisi Jumlah Terminal Angkutan Umum selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan. Dari 3 Terminal Yang ada menjadi 2 terminal dikarenakan Terminal Regional yang berubah status tidak termasuk sebagai terminal sesuai KM 109 Tahun 2021. Namun, dari tahun 2022 hingga 2023 tidak mengalami perubahan, Jumlah Terminal yang ada tetap 2 Terminal.



10. Indikator Kinerja Pendukung : Jumlah Angkutan Darat (Umum)

Angkutan Umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di darat.

- a. Maksud dan tujuan angkutan umum
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan angkutan umum adalah untuk memberikan pelayanan kebutuhan angkutan terhadap masyarakat.
- b. Kebutuhan akan Kendaraan angkutan umum
Kebutuhan akan kendaraan angkutan umum sangat diperlukan agar tersedianya angkutan umum terutama untuk orang.
- b. Fungsi dan peran angkutan umum
Angkutan umum berperan sebagai alat angkut baik untuk orang atau barang yang digunakan oleh umum (masyarakat).
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan jumlah angkutan umum
Permasalahan yang dihadapi dalam rangka peningkatan jumlah angkutan darat adalah adanya peningkatan jumlah kendaraan roda 2 (dua), sehingga masyarakat lebih menggunakan motor daripada angkutan penumpang umum.
- d. Penyebab timbulnya permasalahan dalam peningkatan jumlah angkutan umum
Permasalahan dalam peningkatan jumlah angkutan umum disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat terhadap pembelian motor.
- e. Solusi dan saran guna peningkatan jumlah angkutan umum Yang dapat dijadikan solusi dan saran guna peningkatan jumlah angkutan umum adalah dengan :
 - a) sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sehingga kepadatan lalu lintas dapat dikurangi.
 - b) Untuk angkutan umum harus lebih taat pada aturan mengenai kelengkapan surat dan kelengkapan kendaraan lainnya sehingga penumpang lebih aman dan nyaman dalam menggunakan angkutan umum.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan tetap seperti yang terlihat pada tabel 16 berikut ini:

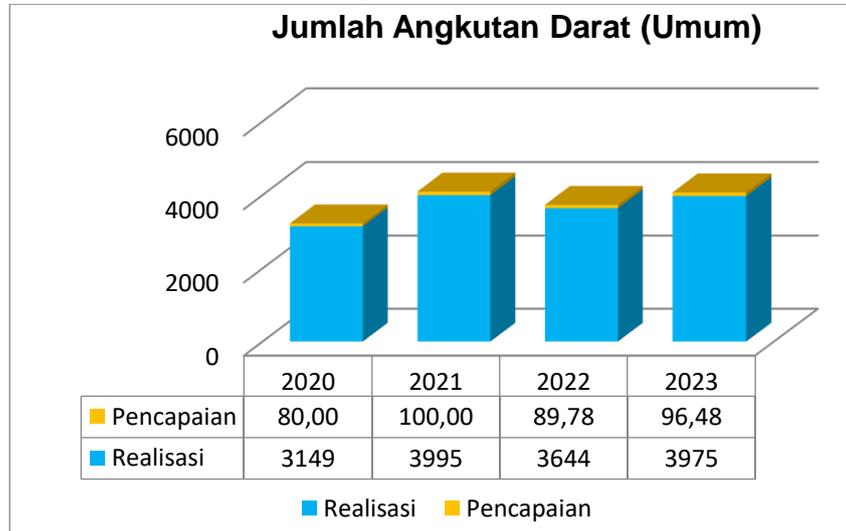
Tabel 16
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Angkutan Darat (Umum)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	3.149	3.995	3.644	3.975
Pencapaian	80	100	89,78	96,48



Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 10 berikut ini :

Grafik 10
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Angkutan Darat (Umum)



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Jumlah Angkutan darat (Umum) disesuaikan dengan jumlah Taman Kendaraan Wajib Uji (KBWU) yang terdata di Dinas Perhubungan Kab.Muara Enim, pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan asumsi pertumbuhan 15%. Selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi (naik dan turun). Namun, tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah angkutan darat (umum) dari tahun sebelumnya. Angkutan umum sekarang yang ada dan beroperasi yaitu :

- a. Bus BRT 5 Unit yang beroperasi dari Kecamatan-kecamatan ke dalam Kota Muara Enim
- b. Bus Damri 3 Unit dengan Trayek Muara Enim – Palembang.

11. Indikator Kinerja Pendukung : Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan fluktuatif seperti yang terlihat pada tabel 17 berikut ini:

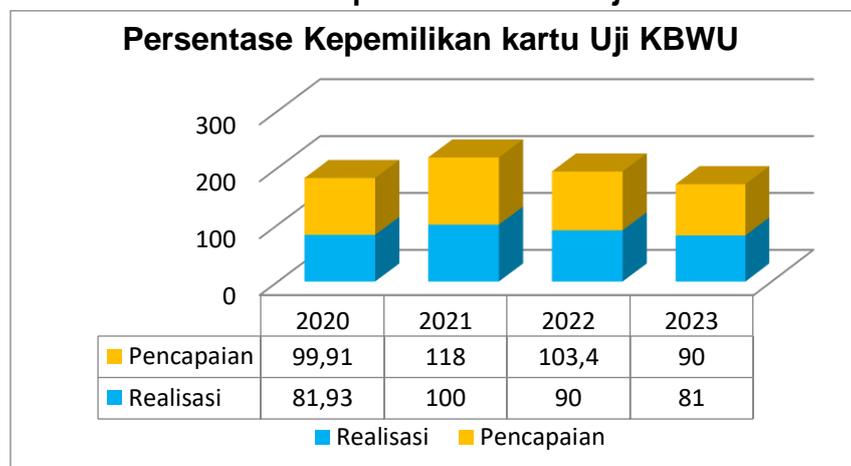
Tabel 17
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	81,93	100	90	81
Pencapaian	99,91	118,00	103,40	90,00



Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 11 berikut ini :

Grafik 11
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2019 s.d. 2022
Persentase Kepemilikan Kartu Uji KBWU



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Persentase Kepemilikan Buku Uji Kendaraan Umum mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Namun, Persentase Kepemilikan Buku Uji Kendaraan Umum tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan flat luar Muara Enim yang melakukan uji berkala di daerah asal flat kendaraan tersebut.

12. Indikator Kinerja Pendukung : Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Ketentuan Waktu dalam Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR) adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengujian syarat teknis dan laik jalan untuk satu kendaraan bermotor sampai diterbitkannya Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) Kendaraan Bermotor

Maksud dan tujuan adanya ketentuan Waktu dalam Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Adapun maksud dan tujuan ketentuan waktu dalam pengujian kelayakan angkutan umum, yaitu:

- 1) Mengukur kinerja pegawai di UPTD PKB KIR
- 2) Memberikan tanggung jawab kepada penguji berapa lama alat melakukan unjuk kerja
- 3) Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Kendaraan bermotor yang wajib mengikuti ketentuan waktu dalam pengujian KIR :

- 1) Mobil penumpang umum;



- 2) Mobil bus;
- 3) Mobil barang;
- 4) Kereta gandengan;
- 5) Kereta tempelan.

Adapun kendaraan yang telah mengikuti ketentuan waktu dalam pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), adalah:

- 1) Mobil penumpang umum

Adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dengan dipungut bayaran.

- 2) Mobil Bus

Adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- 3) Mobil Barang

Adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

- 4) Kereta Gandengan

Adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

- 5) Kereta Tempelan

Adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk menangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 18 berikut ini:

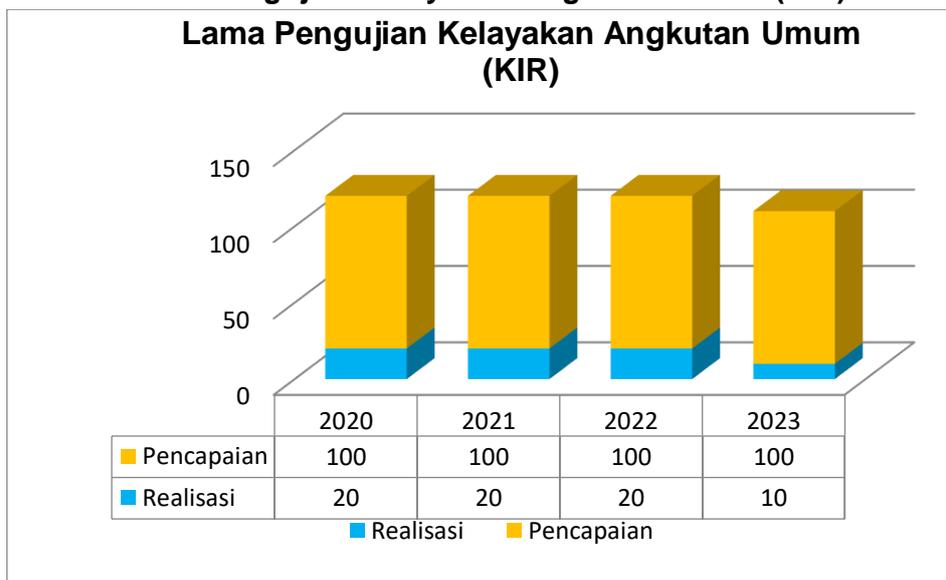
Tabel 18
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	20	20	20	10
Pencapaian	100	100	100	100

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 12 berikut ini :



Grafik 12
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Indikator Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) selama 4 tahun terkesan mengalami penurunan pada tahun 2023. Namun yang mengalami penurunan adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk pengujian kelayakan angkutan umum dari 20 menit menjadi 10 menit. Dalam hal ini, target capaian dan realisasi sebenarnya meningkat. Dalam proses meningkatkan pencapaian ini dilakukan dengan:

- Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM
- Melakukan perbaikan dan perawatan serta kalibrasi alat uji agar hasil uji akurat dan valid.

13. Indikator Kinerja Pendukung : Rasio Panjang Jalan Per - Jumlah Kendaraan

Panjang Jalan ialah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah. Panjang jalan di Kabupaten Muara Enim mempunyai status Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Jumlah kendaraan di Kabupaten Muara Enim terdiri dari kendaraan Umum dan kendaraan tak umum (pribadi), angkutan orang maupun angkutan barang.

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Muara Enim. Semakin rendah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, semakin baik. Semakin tinggi nilai/angka rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, semakin buruk, yang dapat menyebabkan kemacetan di jalan.



Permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan rasio panjang jalan per-jumlah kendaraan adalah pertumbuhan kendaraan lebih tinggi (pesat) dibandingkan pertumbuhan jalan yang berarti jalan tidak bertambah. Hal ini disebabkan oleh pembangunan jalan tidak bertambah dan pertumbuhan kendaraan dengan berbagai jenis semakin meningkat dengan harga bersaing.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 19 berikut ini:

Tabel 19
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Rasio Panjang Jalan Per - Jumlah Kendaraan

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	0.00617	0.00592	0.00672	0.00600
Pencapaian	104	100	113,5	101,35

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 13 berikut ini :

Grafik 13
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Rasio Panjang Jalan Per - Jumlah Kendaraan



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa Rasio panjang jalan per-jumlah kendaraan. Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang artinya jumlah kendaraan semakin berkurang pada 1 km



panjang jalan. Namun, realisasi rasio Panjang Jalan per-Jumlah Kendaraan pada tahun 2023 sudah melebihi target capaian pada tahun tersebut.

Solusi dan saran guna peningkatan rasio panjang jalan per-jumlah kendaraan agar pertumbuhan jalan terus dan meningkat ialah mengutamakan pembangunan jalan.

14. Indikator Kinerja Pendukung : Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun

Orang yang melalui terminal adalah orang yang dalam hal ini penumpang tiba atau berangkat dari terminal. Kendaraan orang yang melalui terminal adalah semua kendaraan yang mengangkut orang melewati terminal. Secara fisik kondisi terminal orang di Kabupaten Muara Enim adalah baik. Jumlah terminal di Kabupaten Muara Enim yang melayani penumpang tiba/berangkat terdapat 2 lokasi terminal, yaitu terminal sp.Kodim Muara Enim dan terminal Bantingan Tanjung Enim.

Adapun penyebab timbulnya permasalahan dalam peningkatan jumlah orang yang melalui terminal adalah kendaraan orang tidak mau masuk untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal dalam hal ini rendahnya kesadaran pemilik kendaraan orang untuk masuk dan melewati terminal. Kondisi ini dapat juga menyebabkan terminal tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut dipicu oleh fasilitas dan pelayanan yang disediakan di terminal belum menarik minat dan kesadaran penumpang dan pemilik kendaraan.

Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan fluktuasi, seperti yang terlihat pada tabel 20 berikut ini:

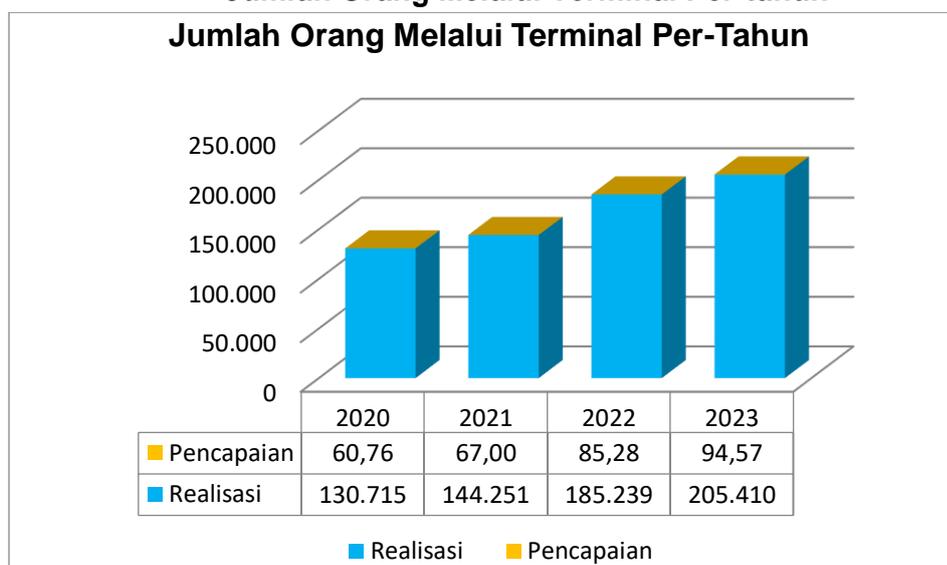
Tabel 20
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	130.715	144.251	185.239	205.410
Pencapaian	60,76	67	85,28	94,57

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 14 berikut ini :



Grafik 14
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Orang Melalui Terminal Per-tahun



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Jumlah Orang Melalui Terminal Per-Tahun selama 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dikarenakan pembatasan perjalanan masyarakat untuk keluar rumah/keluar kota sudah dihapuskan yang berdampak pada peningkatan aktivitas angkutan yang mengangkut orang dan bertambahnya kendaraan yang beroperasi. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membuka peluang beroperasinya bus DAMRI dari pusat tahun 2023, bus damri dengan trayek Muara Enim – Palembang beroperasi sebanyak 3 unit.

Solusi dan saran guna peningkatan jumlah orang yang melalui terminal adalah dengan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan angkutan umum.

15. Indikator Kinerja Pendukung : Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun

Barang melalui terminal adalah barang yang diangkut melalui terminal (kedatangan / keberangkatan). Untuk saat ini barang yang diangkut melalui terminal hanya berupa barang bawaan penumpang naik/turun di terminal penumpang angkutan jalan.

Adapun permasalahan pendataan jumlah barang yang terangkut melalui terminal adalah barang tersebut tidak terdata, dikarenakan angkutan barang semestinya naik/turun pada terminal khusus untuk barang dan angkutan yang membawa khusus barang.



Untuk estimasi jumlah barang yang melalui terminal sesuai kapasitas yang tertera pada bukti lulus uji kendaraan angkutan penumpang umum bahwa seorang penumpang maksimum diizinkan membawa barang seberat 10 kilogram.

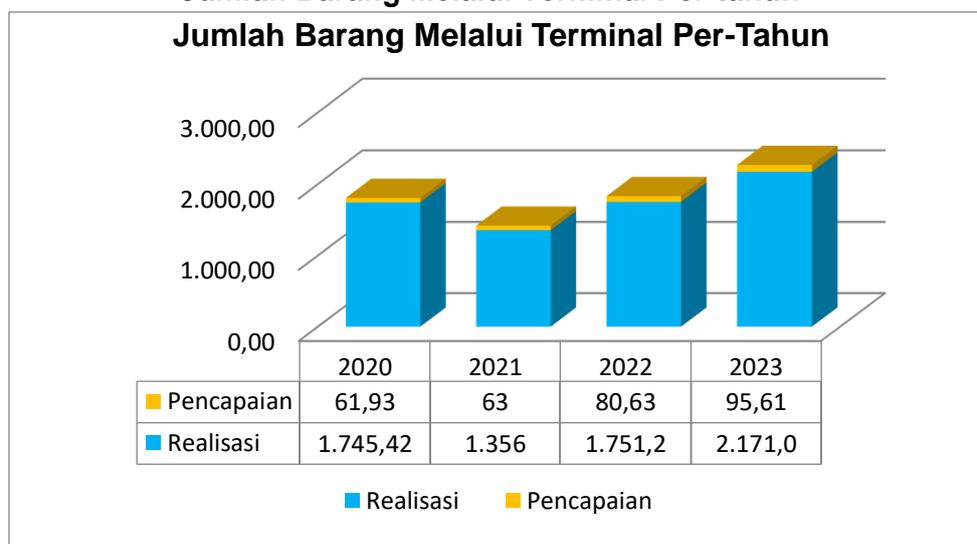
Tingkat realisasi beserta tingkat capaian untuk indikator ini sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kecenderungan meningkat, seperti yang terlihat pada tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Realisasi dan Pencapaian dari Tahun 2020 s.d Tahun 2023
Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	1.745.42	1.356	1.751,2	2.171
Pencapaian	61,93	63,00	80,63	94,61

Statistik persentase tingkat capaian untuk indikator ini, seperti yang terlihat pada grafik 15 berikut ini :

Grafik 15
Tingkat Pencapaian dari Tahun 2020 s.d. 2023
Jumlah Barang Melalui Terminal Per-tahun
Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa trend perkembangan Jumlah Barang Melalui Terminal Per-Tahun mulai tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuasi. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi covid 19 yang sudah membaik sehingga kendaran yang beroperasi mengalami peningkatan.

Solusi dan saran yang disampaikan adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar segera mengadakan lahan dan pembangunan Terminal Barang.



3.5 Aspek Pendukung

Terhadap Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja yang telah dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis di tahun 2023, salah satu aspek pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan adalah aspek Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 22
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		PNS	TKS
1	S2	7	-
2	S1	18	54
3	D3	1	6
4	D1	-	-
5	SLTA/ sederajat	10	128
6	SMP/SLTP	-	1
7	SD	-	1
Jumlah		36	190

Tabel 23
SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim
Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tk. I (III/d)	3
5	Penata (III/c)	8
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	4
7	Penata Muda (III/a)	7
8	Pengatur Tk. I (II/d)	2
9	Pengatur (II/c)	4
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-
12	Juru (I/c)	-
Jumlah		36



b. Aktivas Tetap (*Fix Asset*)

Disamping sumber daya aparatur dalam pencapaian sasaran strategis di tahun 2023 ini didukung pula oleh aktiva tetap (*fix asset*) dengan nilai sebesar Rp41.170.791.443,07 yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan serta aset lainnya.

Berikut rekapitulasi mutasi barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2023. Disajikan pada tabel 24.

Tabel 24
Rekapitulasi Mutasi Barang
Tahun Anggaran 2023

Kode	Nama Barang	Saldo Setelah Restatement Per 31 Desember 2023
1	Tanah	Rp 10.412.652.930,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp13.744.500.790,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp14.923.250.061,07
4	Jalan, Irigasi dan Bangunan	Rp 1.749.167.662,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 341.220.000,00
7	Aset lainnya	Rp 403.824.100,00
Total		Rp 41.170.791.443,07

a. **Penambahan Peralatan dan Mesin**

Pada tahun 2023 peralatan dan Mesin bertambah sebanyak 188 unit guna mendukung pegawai dalam menjalankan tugas.

b. **Penambahan Bangunan**

Pada tahun 2023 Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim bertambah 4 Unit Bangunan kantor yakni : Pembangunan Dermaga di desa gedung buruk kecamatan muara Belida, Pembangunan Kantor dan Wc Umum UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan, Bangunan Parkir sederhana untuk pegawai Bahan Kanopi



c. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2023 Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tetap.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 dianggarkan dana sebesar Rp.15.980.832.704,00 untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 13.703.877.233,00 atau 85,75 %, dari total anggaran tahun 2023. Adapun realisasikan anggaran per sasaran dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Ketertiban Ber Lalu Lintas di Jalan

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program, 8 (Delapan) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub kegiatan dengan pendanaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.002.466.908,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.752.124.741,00 artinya Laporan Realisasi Keuangan sebesar 75.01 %.

b. Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program, 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan pendanaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 476.219.600,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 467.097.200,00 artinya Realisasi Anggaran Keuangan sebesar 98.08 %.

3.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3. Program Pengelolaan Pelayaran



3.8 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

Tabel 25
Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

No	Uraian Urusan Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Terhadap Capaian (%)
	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Rp15.980.032.704	Rp13.703.677.233	85.75
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.502.148.198	Rp9.484.458.292	90.31
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp48.864.900	Rp45.061.200	92.21
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.902.000	Rp5.105.600	86.51
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp10.386.800	Rp10.385.000	99.99
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp5.958.100	Rp5.442.000	91.34
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp11.130.700	Rp10.725.600	96.36
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp7.533.900	Rp8.453.500	85.43
6	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.399.600	Rp3.916.00	89.01
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.533.800	Rp3.032.500	85.81
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.594.293.534	Rp3.764.283.383	81.93
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.579.191.834	Rp3.749.980.283	81.89



2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp6.424.800	Rp6.357.200	98.95
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp8.677.600	Rp7.945.900	91.57
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp192.937.750	Rp190.604.400	98.79
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp192.937.750	Rp190.604.400	98.79
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp540.016.600	Rp521.524.108	96.58
1	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp216.715.000	Rp214.305.000	98.89
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp116.715.000	Rp107.340.508	91.97
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp189.611.600	Rp182.903.600	96.48
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp16.975.000	Rp16.975.000	100
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.237.708.533	Rp1.215.794.488	98.23
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp55.110.549	Rp50.488.000	91.61
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp74.444.900	Rp71.185.500	95.62
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp137.612.100	Rp127.903.600	92.95
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp30.449.384	Rp28.973.500	95.15
5	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Rp10.805.000	Rp10.400.000	96.25
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp956.912.000	Rp956.119.568	99.92



	SKPD			
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp23.235.800	Rp21.001.800	90.39
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp517.427.000	Rp506.088.250	97.81
1	Pengadaan Mebel	Rp16.493.800	Rp16.400.000	99.43
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp251.377.900	Rp248.670.000	98.92
3	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp249.555.300	Rp241.018.250	98.58
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.840.073.296	Rp2.743.981.729	96.62
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.699.900	Rp3.210.000	86.76
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp289.039.180	Rp210.811.729	78.36
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp35.044.218	Rp30.970.000	85.92
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.531.290.000	Rp2.498.990.000	98.72
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp530.824.283	Rp497.120.754	93.85
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp185.358.125	Rp179.307.054	96,74
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp345.466.158	Rp317.813.700	92.00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp5.002.466.908	Rp3.752.124.741	75.01
01	Penyediaan Perlengkapan	Rp1.533.650.700	Rp852.316.850	42.53



	Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.184.685.300	Rp852.316.850	42.53
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp348.983.400	Rp334.274.000	95.79
1	Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C	Rp50.000.000	Rp49.889.000	99.78
1	Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C	Rp50.000.000	Rp49.889.000	99.78
02	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	Rp36.503.700	Rp35.622.500	97.59
1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Rp36.503.700	Rp35.622.500	97.59
03	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp576.397.200	Rp545.955.413	94,72
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp118.501.500	Rp107.525.200	90.84
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp52.649.000	Rp49.443.999	93.91
3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp62.003.300	Rp56.782.400	91.49
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp243.592.000	Rp237.185.814	97.37
6	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp49.651.400	Rp44.945.000	90.52
04	Pelaksanaan Manajemen dan	Rp1.374.043.908	Rp1.209.027.028	87.99



	Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
1	Penata Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Rp232.471.800	Rp221.524.350	95.29
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp1.104.525.108	Rp955.816.058	86,54
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten /Kota	Rp37.047.000	Rp31.686.620	85.53
05	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp64.481.400	Rp62.213.450	96.48
2	Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp64.481.400	Rp62.213.450	96.48
06	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp61.030.000	Rp60.689.100	99.44
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp61.030.000	Rp60.689.100	99.44
07	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp334.505.248	Rp326.386.650	97,57
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.306.360.000	Rp1.13.411.400	86.99
	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp476.219.500	Rp467.094.200	98.08
01	Pembangunan dan Penertiban Izin Pembangunan	Rp476.219.500	Rp487.094.200	98.08



	dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
1	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp100.000.000	Rp99.478.000	99,48
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp376.219.600	Rp367.616.200	97.71

Dari 3 (Tiga) program dan 17 (Tujuh Belas) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023, terdapat 3 (Tiga) Sub Kegiatan yang tingkat capaiannya masih dibawah 85%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tingkat capaian Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 81,89%, Hal tersebut dikarenakan Efisiensi Anggaran.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat capaian Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik sebesar 78.36%, Hal tersebut dikarenakan Efisiensi Anggaran.

3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Tingkat capaian Sub Kegiatan a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar 28,85%. Hal tersebut dikarenakan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB IV PENUTUP

4.1 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim tahun 2023, yaitu :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
- b. Pengukuran kinerja dalam LAKIP dilakukan dengan menilai pencapaian setiap indikator sasaran guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.
- c. Pengukuran Kinerja (PK) dilakukan berdasarkan sasaran dan indikator sasaran serta Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dan pengukuran kinerja dilakukan dengan indikator kinerja setingkat *outcome*.
- d. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari Pemikiran yang sistematis dan berkesinambungan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :
 - 1) Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi :

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- 2) Rumusan yang digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) \times 100}{\text{Rencana}} \%$$

- 3) Rumusan yang digunakan, apabila semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya pencapaian

$$\begin{array}{l} \text{Prosentase Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi}) \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$



- e. Perincian hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran stratejik disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 26
Persentase Pencapaian Sasaran

NO	SASARAN	PENCAPAIAN(%)
1	Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas di Jalan	75.01
2	Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi	98.08

4.2 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2023 dianggarkan dana sebesar Rp.15.980.832.704,00 untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 13.703.877.233,00 atau 85,75 %, dari total anggaran tahun 2023. Adapun realisasi anggaran per sasaran dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Ketertiban Berlalu Lintas di Jalan

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program, 8 (Delapan) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub kegiatan dengan pendanaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.002.466.908,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.752.124.741,00 artinya Laporan Realisasi Keuangan sebesar 75.01 %.

b. Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi

Sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program, 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) Sub Kegiatan dengan pendanaan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 476.219.600,00 dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 467.097.200,00 artinya Realisasi Anggaran Keuangan sebesar 98.08 %.

Muara Enim, Januari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUARA ENIM

H. JUNAIDI, S.H.M.Hum.M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197106131994031001